

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah, sumber daya alam ini lebih dikenal dengan mineral dan batubara (minerba). Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah pengawasan pemerintah desa terhadap tambang rakyat di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin, Apakah yang menjadi kendala pemertintah desa dalam melakukan pengawasan terhadap tambang rakyat di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin, Bagaimanakah upaya mengatasi kendala pemertintah desa dalam melakukan pengawasan terhadap tambang rakyat di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin. Adapun tipe penelitian ini adalah *Yuridis Sosiologis*. Di dalam penulisan proposal skripsi ini penulis gunakan model pendekatan *Empiris* dan *Socio-Legal Research*. Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*. Pengawasan yang dilakukan pemerintah Desa atas kegiatan tambang rakyat Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin meliputi pengawasan tata cara penambangan, pengawasan lingkungan, pengawasan produksi, pengawasan kegiatan tata cara penambangan yang didalamnya mencakup tata cara pengangkutan, penggalan dan penjualan. Kendala melakukan pengawasan terhadap tambang rakyat seperti sulitnya melakukan pengawasan kegiatan tata cara penambangan yang didalamnya mencakup tata cara pengangkutan, penggalan. hal ini di sebabkan jumlah personil pemerintahan Desa yang di tugaskan untuk melakukan pengawasan hanya ada 3 (tiga) orang utusan sedangkan jumlah tambang rakyat dan luas tambang rakyat jauh lebih banyak dan luas. Adapun upaya yang dilakukan sebagai pemertintah desa untuk mengatasi kendala terkait sulitnya melakukan pengawasan kegiatan yang mencakup tata cara pengangkutan, penggalan dan penjualan ialah dengan melibatkan stekolder atau pihak lain seperti LSM lingkungan untuk turun ke lapangan per 3 bulan sekali ke lokasi tambang rakyat bersama pemerintah Desa guna bersama sama mengawasi proses pengangkutan, penggalan dan penjualan hasil tambang rakyat tersebut. Saran yang dikemukakan hendaknya Perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat dan dinas terkait tentang pemberian izin usaha tambang, karena di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin sendiri sudah banyak usaha-usaha tambang rakyat yang belum memiliki izin.

Kata Kunci : Pengawasan Pemerintah Desa, Tambang Rakyat

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries in the world that has abundant natural resource reserves, these natural resources are better known as minerals and coal (minerba). Minerals and coal contained in the mining jurisdiction of Indonesia are non-renewable natural resources as a gift from God Almighty which have an important role in fulfilling the needs of many people, therefore its management must be controlled by the State to provide real added value to the national economy in an effort to achieve prosperity and people's welfare in a just manner. The issues raised are How does the village government supervise people's mining in Simpang Parit Village, Renah Pembarap District, Merangin Regency, What are the obstacles for the village government in supervising people's mining in Simpang Parit Village, Renah Pembarap District, Merangin Regency, What are the efforts to overcome the obstacles for the village government in supervising people's mining in Simpang Parit Village, Renah Pembarap District, Merangin Regency. The type of this research is Juridical Sociological. In writing this thesis proposal, the author uses the Empirical and Socio-Legal Research approach models. The technique of taking material is done by Purposive Sampling material. Supervision carried out by the Village Government over the mining activities of the people of Simpang Parit Village, Renah Pembarap District, Merangin Regency includes supervision of mining procedures, environmental supervision, production supervision, supervision of mining procedure activities which include transportation, excavation and sales procedures. Obstacles in supervising community mines such as the difficulty of supervising mining procedures which include transportation and excavation procedures. This is because the number of Village government personnel assigned to carry out supervision is only 3 (three) delegates, while the number of community mines and the area of community mines are much greater and wider. The efforts made as a village government to overcome obstacles related to the difficulty of supervising activities that include procedures for transportation, excavation and sales are by involving stekolder or other parties such as environmental LSM to go to the field every 3 months to the people's mining location together with the village government to jointly supervise the process of transportation, excavation and sales of the people's mining products. The suggestions put forward should require special attention from the central government and related agencies regarding the granting of mining business permits, because in Simpang Parit Village, Renah Pembarap District, Merangin Regency itself, there are many people's mining businesses that do not yet have permits.

Keywords: Village Government Supervision, Community Mining